

# SKRIPSI

## PERAN ORGANISASI MAHASISWA (ORMAS) KEHASISWAAN DALAM PENDIDIKAN POLITIK MENJELANG PEMILU 2019

(Studi Khusus Peran SMI Kota Mataram)



OLEH :

FIRMAN SANJAYA PUTRA

NIM. 21513A0040

KONSENTRASI POLITIK PEMERINTAHAN  
PROGRAM STUDI PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

2019

# **SKRIPSI**

## **PERAN ORGANISASI MAHASISWA (ORMAS) KEHASISWAAN DALAM PENDIDIKAN POLITIK MENJELANG PEMILU 2019**

**(Studi Khusus Peran SMI Kota Mataram)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata (S1)  
Pada Program Studi: Studi Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Mataram



**OLEH :**

**FIRMAN SANJAYA PUTRA**

**NIM. 21513A0040**

**KONSENTRASI POLITIK PEMERINTAHAN  
PROGRAM STUDI PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

**2019**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FIRMAN SANJAYA PUTRA  
NIM : 21513A0040  
Jenjang : S-1  
Prodi : Studi Pemerintahan  
Fakultas : Fakultas Sosial Dan Ilmu Politik

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Mataram, 11 Juli 2019  
Yang menyatakan



Firman Sanjaya Putra  
Nim. 21513A0040

HALAMAN PERSETUJUAN  
SKRIPSI

PERAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN (ORMAS) DALAM PENDIDIKAN  
POLITIK MENJELANG PEMILU 2019  
(Studi Kasus Peran SMI Kota Mataram)



Disusun dan diajukan oleh:

**Firman Sanjaya Putra**  
NIM. 21513A0040

PROGRAM STUDI  
STUDI PEMERINTAHAN

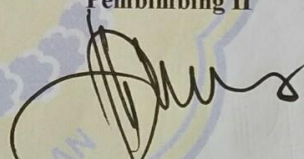
Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam sidang skripsi

Mataram, 22 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**L. Sopan Tirta Kusuma, S.IP, M.Si**  
NIDN. 0825038303

  
**Dedy Iswanto, ST, MM**  
NIDN. 0818087901

Mengetahui.  
Ketua Program Studi  
Studi Pemerintahan

  
**Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP**  
NIDN. 0816057902

HALAMAN PERNGESAHAN  
SKRIPSI  
PERAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN (ORMAS) DALAM PENDIDIKAN  
POLITIK MENJELANG PEMILU 2019  
(Studi Kasus Peran SMI Kota Mataram)



Disusun dan diajukan oleh

Firman Sanjaya Putra  
NIM. 21513A0040

PROGRAM STUDI  
STUDI PEMERINTAHAN

Telah dipertahankan dalam ujian skripsi pada tanggal: **10 Agustus 2019** dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Tim Penguji,

1. L. Sopan Tirta Kusuma, S.IP., M.Si Ketua (.....)  
NIDN. 0825038303
2. Dedy Iswanto, ST., MM Anggota I (.....)  
NIDN. 0818087901
3. M. Taufik Rachman, SH., MH Anggota II (.....)  
NIDN. 0825078701

Mengesahkan,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Mataram  
Dekan,



Drs. Amil., MM  
NIDN. 0831126204

## MOTTO

**Bekerjalah Untuk Duniamu  
Seakan-Akan Kamu Hidup Untuk Selamanya.  
Dan  
Beribadahlah Untuk Akhiratmu  
Seakan-Akan Kamu Mati Besok.**

---

**“Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan.  
Maka Apabila Engkau Telah  
Selesai Dari Sesuatu Urusan,  
Tetaplah Bekerja Keras (Untuk Urusan Yang Lain).  
Dan  
Hanya Kepada Tuhanmulah Engkau Berharap”  
(QS. Al-Insyirah: 6-8)**

## LEMBAR PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah, segala puji dan syukur tercurah pada-Mu ya Rabb. Karena rahmat, hidayah dan inayah-Mu peneliti dapat mencurahkan inspirasi dalam skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam yang akan senantiasa kita nantikan safaatnya di yaumul qiyamah.*

*Dalam menyelesaikan skripsi peneliti mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik moril, materiil dan spiritual. Baik dalam bentuk bimbingan, arahan dan data-data yang berguna dalam penelitian skripsi ini. Tanpa bantuan mereka skripsi ini tidak dapat terselesaikan.*

### ***Ku persembahkan skripsi ini untuk :***

*Bapak dan ibu tercinta, yang telah mendidik, mendoakan dan memberikan kasih sayang serta menjadi panutan yang baik untukku.*

*Untuk yang terkasih saudara dan suadariku.*

*Sahabat dan rekan- rekan seperjuanganku, ilmu pemerintahan 2015.*

*Serta Almamater tercinta, Universitas Muhammadiyah Mataram yang kubanggakan.*

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelaikan penulisan Skripsi dengan judul **“Peran Orrganisasi Mahasiswa (ORMAS) Kemahasiswaan Dalam Pendidikan Politik Menjelang Pemilu 2019”** (Studi Khusus Peran SMI Kota Mataram) ini tepat pada waktunya.

Penulis Menyadari bahwa tidak mungkin dapat diselaikan tanpa adanya arahan, bimbingan, saran, serta bantuan-bantuan, untuk itu melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. H. Arsyad Abd Ghani, M. pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram Beserta Jajarannya.
2. Bapak Drs. Amil, MM selaku Dekan Fakultas Fisipol Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Ayatullah Hadi, S.IP. M.IP selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Lalu Sopan Tirta Kusuma, S. IP, M. SI selaku Dosen Pembimbing I
5. Dedy Iswanto, ST., MM selaku Dosen Pembimbing II

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini mungkin jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis membuka diri dari adanya kritik dan saran yang membangun tentunya dari orang-orang berkompeten guna memperbaiki kekurangan di dalam penulisan ini. Penulis Berharap mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi segenap pembaca sebagai kajian terutama bagi penulis.

Mataram, 11 Juli 2019

Penulis

**Firman Sanjaya Putra**

Nim: 21513A0040



**PERAN ORGANISASI MAHASISWA (ORMAS) KEHASISWAAN  
DALAM PENDIDIKAN POLITIK MENJELANG PEMILU 2019**

**(Studi Khusus Peran SMI Kota Mataram)**

**“Firman Sanjaya Putra”**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui bagaimana peran Serikat Mahasiswa Indonesia dalam memberikan pendidikan politik menjelang pemilu 2019.

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menguraikan dan menjelaskan hasil-hasil penelitian dalam bentuk kata-kata lisan maupun tertulis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Teknik analisa data yaitu menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Momentum Pemilu Borjuasi 2019 juga mesti dijawab oleh kepeloporan gerakan kaum muda dengan terus mengkampanyekan delegitimasi politik borjuasi yang sudah bangkrut dan menyerukan persatuan gerakan rakyat untuk membangun kekuatan alternative. Gerakan golput jika tidak disertai dengan aktifitas revolusioner untuk menyuarakan “kami butuh politik alternative” juga tidak akan menjadi kekuatan yang signifikan. Oleh karena itu, gerakan mahasiswa bersama gerakan rakyat harus segera menyusun agenda-agenda revolusioner, serta menegaskan tekad untuk memperkuat persatuan semua sektor kerakyatan, sebagai senjata untuk merebut kedaulatan ekonomi-politik kembali ketangan kelas pekerja.

**Kata Kunci : Peran, Politik**

# **ROLE OF STUDENT ORGANIZATIONS (ORMAS) OF STUDENTS IN POLITICAL EDUCATION AS AGAINST THE ELECTION 2019**

**(Special Study of the Role of Mataram City High School)**

**“Firman Sanjaya Putra”**

**Faculty of Social and Political Sciences, Muhammadiyah University of  
Mataram**

## **ABSTRACT**

This research method uses qualitative methods, by describing and explaining the results of research in the form of words or written. Data collection methods used are using the method of observation, interviews, and documentation. the type of data used in this study are primary data and secondary data. Data analysis techniques are using data reduction, data presentation and gathering conclusions.

The results of this study indicate that the momentum of the 2019 bourgeoisie election was also responded to by the pioneering youth movement by continuing to campaign for the bankrupt political delegitimation that had gone bankrupt and dragged the unity of the people's movement to build alternative forces.

The abstentions movement if it does not support revolutionary activities to voice "we need alternative politics" will also not be a significant force. Therefore, the student movement together with the people's movement must immediately formulate revolutionary agendas, and ask for determination to strengthen the unity of all popular sectors, as a weapon to achieve economic-political sovereignty back into the hands of the working class.

**Keywords: Role, Politics**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PESETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTO.....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACK.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	2
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	3
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 PenelitianTerdahulu .....	6
2.2 Tinjauan Teori.....	14
2.2.1 Pengertian Organisasi Massa (ORMAS) .....	14
2.2.2 Sejarah Oraganisasi Massa (ORMAS).....	15
2.2.3 Jenis-jenis Organisasi Massa .....	18
2.2.4 Tujuan dan Fungsi Massa.....	18

2.2.5 Fungsi Organisasi Massa .....	19
2.3 Sejarah Organisasi Massa Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) .....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian.....	23
3.2 Pendekatan Penelitian .....	23
3.2.1 Penelitian Normatif .....	23
3.2.2 Penelitian Empiris .....	23
3.3 Sumber Data.....	24
3.3.1 Data Primer .....	24
3.3.2 Data Sekunder.....	24
3.4 Pengumpulan Data .....	24
3.4.1 Wawancara.....	25
3.4.2 Studi Kepustakaan.....	25
3.5 Lokasi Penelitian .....	26
3.5.1 Responden .....	26
3.6 Analisa Data .....	26
3.7 Proses Berfikir .....	27
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
4.1 Sejarah Lahirnya Serikat Mahasiswa Indonesia .....	28
4.2 Peran Serikat Mahasiswa Indonesia dalam Memeberikan Pendidikan Politik Menjelang Pemilu 2019.....	36
4.3 Sikap Politik Ormas Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) Cabang Mataram Terhadap Pemilu 2019 .....	36
4.4 Berjalan atau tidaknya Pemilu Borjuis 2014 Kekuatan yang Akan menggerakkan Indonesia adalah Kekuatan kelas Pemodal .....	48

4.5 Persatuan Rakyat Sebagai jalan Utama Menuju Pembebasan

Nasional Melawan Imprealisme ..... 50

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Kesimpulan ..... 71

5.2 Saran..... 72

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar belakang masalah**

Tidak lama lagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan menggelar pesta demokrasi untuk memilih orang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan juga calon presiden serta calon wakil presiden. Guna mendulang suara yang melimpah, sejumlah partai politik (parpol) yang menjadi peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 berupaya memikat hati berbagai lapisan masyarakat. Tidak terkecuali para mahasiswa yang memiliki peran besar dalam perolehan suara, sebanyak 40 persen. Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) Cabang Mataram. Namun, pada kenyataannya parpol di Indonesia hanya muncul ketika menjelang pemilu saja, dan kemunculan mereka bukan untuk memberikan pendidikan politik secara jelas dan berkelanjutan melainkan hanya untuk mencari simpati masyarakat agar memilih calon yang diusung oleh mereka. “Parpol di Indonesia bisa diibaratkan seperti seseorang yang mendorong mobil mogok. Ketika mobil tidak berjalan politisi memanggil rakyat untuk membantu mendorong mobil. Tetapi ketika mobil itu sudah menyala, orang yang membantu pasti ditinggalkan,

Mahasiswa memiliki andil yang besar dalam proses pendidikan politik terhadap masyarakat. “Masyarakat harus mendapatkan pemahaman mengenai politik, supaya tidak tertipu ketika elit politik berbondong-bondong datang menawarkan visi, misi serta janji. Sebagai kaum terpelajar, mahasiswa harus melek terhadap isu politik yang ada di negeri ini, agar bisa membantu masyarakat yang awam.

Generasi milenial yang saat ini menjadi mahasiswa sangat sering mengakses media sosial di berbagai tempat dan waktu. Sementara itu, terdapat banyak sekali konten di media sosial mengandung berita bohong atau hoax terkait isu politik. Oleh karena itu “Sekarang, banyak sekali informasi bohong yang tersebar melalui media sosial. Untuk itu, kawan – kawan sekalian harus bisa menyaring informasi dengan baik,

mereka tidak akan berpartisipasi dalam politik praktis 2019. Tetapi, mereka akan tetap melakukan pendidikan politik kepada mahasiswa dan masyarakat umum tentunya. Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari ketua umum Serikat Mahasiswa Indonesia bahwa organisasi mereka tidak akan ikut campur untuk memenangkan salah satu parpol yang berpartisipasi dalam pemilu 2019. “Organisasi kami tidak akan turut serta dalam politik praktis besok, akan tetapi kami akan selalu memberikan pemahaman politik kepada masyarakat agar tidak termakan janji palsu para elit politik.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran Serikat Mahasiswa Indonesia dalam memberikan pendidikan politik menjelang pemilu 2019?
2. Bagaimana sikap politik ormas Serikat Mahasiswa Indonesia terhadap pemilu 2019!

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Menurut Soerjono Soekanto maksud dan tujuan penelitian adalah merupakan bagian pokok ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih mendalami segala segi kehidupan. Penelitian juga merupakan sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baik dari segi teori dan praktik. Kemudian menurut beliau tujuan penelitian hukum dapat terbagi menjadi dua yaitu, tujuan penelitian hukum secara umum dan tujuan penelitian hukum secara khusus. Tujuan penelitian secara khusus merupakan pengkhususan dan tambahan pada tujuan penelitian ilmu – ilmu sosial.

Berdasarkan permasalahan yang ada sejalan dengan pemikiran di atas maka penelitian ini mempunyai dua tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Serikat Mahasiswa Indonesia dalam memberikan pendidikan politik menjelang pemilu 2019!
2. Untuk mengetahui bagaimana sikap politik ormas Serikat Mahasiswa Indonesia terhadap pemilu 2019!

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian pasti mendatangkan manfaat sebagai tindak lanjut dari apa yang telah dirumuskan dalam tujuan penelitian. Penulis mengharapkan dengan adanya penelitian ini membawa manfaat positif bagi penulis atau pembaca secara langsung maupun secara tidak langsung.



Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam dunia pendidikan politik di masyarakat. Pandangan itu berkaitan dengan peran ormas dalam hal ini Serikat Mahasiswa Indonesia Cabang Mataram dalam memberikan pendidikan politik kepada mahasiswa dan masyarakat menjelang pemilu 2019.

#### 2. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini dapat memberikan pengalaman kepada peneliti, dan bisa dijadikan pembelajaran agar dapat menjadi peneliti yang handal ke depannya.

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi sekaligus literatur bagi fakultas fisipol program studi ilmu pemerintahan universitas muhammadiyah mataram yang ingin memberikan pengetahuannya dalam memberikan pendidikan politik menjelang pemilu yang akan datang.

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat tentang pentingnya memberikan pendidikan politik menuju pemilu yang akan datang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pemilihan Umum (PEMILU)**

##### **2.1.1. Pengertian Pemilihan Umum (PEMILU)**

Berikut ini adalah pengertian Pemilu menurut berbagai versi, ada menurut para ahli, Undang-Undang, secara umum. Berikut pengertian nya :

###### **1. Menurut Ali Moertopo**

Menurut Ali Moertopo pengertian Pemilu sebagai berikut: “Pada hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankn kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara”.

###### **2. Menurut Morissan**

Menurut Morissan, Pemilihan umum adalah cara atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan negara kedepan. Paling tidak ada tiga macam tujuan pemilihan umum, yaitu memungkinkan peralihan pemerintahan secara aman dan tertib untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam rangka melaksanakan hak asasi warga Negara.

### 3. Menurut Suryo Untoro

Pemilihan Umum (yang selanjutnya disingkat Pemilu) adalah suatu pemilihan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, untuk memilih wakil-wakilnya yang duduk dalam Badan Perwakilan Rakyat, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Tingkat II (DPRD I dan DPRD II)”.

### 4. Menurut Ramlan

Pemilu diartikan sebagai “ mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai.

### 5. Menurut Harris G. Warren dan kawan-kawan

Pemilu merupakan: “Elections are the occasions when citizens choose their officials and decide, what they want the government to do. ng these decisions citizens determine what rights they want to have and keep.”

### 6. Pengertian Pemilu secara umum

Sedangkan pengertian Pemilu secara umum adalah sebagai sarana yang penting dalam kehidupan suatu negara yang menganut azas Demokrasi yang memberi kesempatan berpartisipasi politik bagi warga negara untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menyuarakan dan menyalurkan aspirasi mereka.

## 7. Pengertian pemilu menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 pasal 1

Pengertian pemilu menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 pasal 1 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Sekarang, peraturan UU mengenai pemilu sudah mengalami amandemen, yaitu UU Tahun 2017.

## 8. Pengertian pemilu menurut KBBI

Pengertian pemilu menurut KBBI adalah pemilihan yang dilakukan serentak oleh seluruh rakyat suatu negara (untuk memilih wakil rayat dan sebagainya).

### a. Sejarah Pemilu Di Indonesia

Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia sangat penting dilakukan terutama bagi rakyat Indonesia untuk memiliki sebuah proses yang dapat memilih orang untuk mengisi jabatan – jabatan politik tertentu. Proses tersebut dikenal dengan istilah pemilihan umum atau pemilu, yang menjadi penting karena menjadi instrumen yang menentukan arah dan kebijakan publik dari suatu negara. Pada umumnya istilah pemilu lebih dikenal untuk pemilihan anggota legislatif dan presiden serta wakilnya setiap lima tahun sekali. Pada awalnya pemilu di Indonesia ditujukan untuk

memilih para anggota lembaga perwakilan yaitu DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota.

Setelah adanya amandemen keempat UUD 1945 pada tahun 2002, pemilihan presiden dan wakilnya yang semula dilakukan oleh MPR kemudian disepakati untuk dilakukan secara langsung oleh rakyat sehingga menjadi bagian dari rangkaian pemilu. Pemilihan presiden dan wakilnya secara langsung pertama kali diadakan pada tahun 2004, dan pada 2007 berdasarkan UU no.22 Tahun 2007 pemilihan kepala daerah dan wakilnya atau Pilkada juga dijadikan bagian dari proses pemilu. Penyelenggaraan pemilu harus dilakukan secara berkala karena berfungsi sebagai sarana pengawasan bagi rakyat terhadap wakilnya. Pemilihan dalam sejarah singkat pemilu di Indonesia telah diadakan sebanyak 11 kali pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009 dan 2014. Asas dalam sejarah pemilu di Indonesia adalah LUBER, yaitu Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia yang sudah ada sejak zaman Orde Baru. Arti dari masing – masing asas yaitu:

- a. Langsung – Pemilih diharuskan untuk memberikan suaranya sendiri secara langsung dan tidak boleh diwakilkan.
- b. Umum – Pemilu dapat diikuti oleh seluruh warga negara yang sudah memiliki hak pilih atau hak menggunakan suaranya.
- c. Bebas – Pemilih harus memberikan suaranya tanpa paksaan dari pihak manapun.

- d. Rahasia – Suara yang telah diberikan hanya diketahui oleh pemilih itu sendiri.

Pada Era Reformasi kemudian berkembang suatu istilah Jurdil yang berarti Jujur dan Adil. Jujur berarti bahwa pemilu harus dilaksanakan sesuai aturan untuk memastikan bahwa semua warga negara yang memiliki hak bisa memilih sesuai keinginannya dan setiap suara bernilai sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Sementara asas adil adalah perlakuan yang sama terhadap para peserta pemilu dan pemilih tanpa adanya perlakuan istimewa atau diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Semua asas ini mengikat para peserta, pemilih dan penyelenggara pemilu.

#### 1. Pemilu Tahun 1955

Dalam sejarah singkat pemilu di Indonesia, sejarah pemilu 1955 diadakan dua kali berdasarkan UU no. 7 Tahun 1953. Kedua tahap pemilu 1955 tersebut dibedakan berdasarkan tujuannya yaitu pemilu pertama diadakan pada 29 September 1955 untuk memilih anggota – anggota DPR, sedangkan pemilu kedua pada 15 Desember 1955 diadakan untuk memilih anggota – anggota dewan konstituante. Pemilu pertama diikuti 118 peserta terdiri dari 36 parpol, 34 organisasi kemasyarakatan dan 48 organisasi perorangan. Pemilu kedua diikuti 91 peserta, terdiri dari 39 parpol, 23 ormas dan 29 peserta perorangan. Ini merupakan bagian dari sejarah pemilu pada masa orde lama, sebagai satu – satunya pemilu yang dilakukan pada era ini.

## 2. Pemilu Tahun 1971

Pemilu kedua dalam sejarah singkat pemilu di Indonesia ini berlangsung pada masa Orde Baru dengan dasar UU no. 15 tahun 1969. Pemilu ini dilakukan pada tanggal 5 Juli 1971 dengan tujuan untuk memilih anggota DPR dengan sistem perwakilan proporsional atau berimbang. Sebanyak 10 parpol ikut dalam pemilu kali ini yaitu Partai NU, Partai Muslim Indonesia, Partai Serikat Islam Indonesia, Persatuan Tarbiyah Islamiiah, Partai Nasionalis Indonesia, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, Partai Murba dan Sekber Golongan Karya. Ketahui juga mengenai sejarah Partai Nasional Indonesia (PNI), sejarah Partai indonesia( PARTINDO),sejarah paratai komunis indonesia(PKI),dan GERINDO.

## 3. Pemilu Tahun 1977 – 1997

Pada periode ini pemilu dilakukan setiap 5 tahun sekali yaitu tahun 1977, 1982, 1987, 1992, 1997 dengan hanya tiga parpol peserta yaitu Golongan Karya ( Golkar), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan peleburan dari PNI, Parkindo, Partai Katolik, Partai IPKI dan Partai Murba. Satu parpol lagi adalah Partai Pembangunan Persatuan (PPP) yang merupakan fusi dari NU, Parmusi, Perti dan PSII. Penyebab peserta pemilu yang hanya sedikit ini terjadi setelah pemerintah dan DPR menyederhanakan jumlah partai melalui UU no. 3 tahun 1975 tentang Parpol dan Golkar. Pada periode ini kontestan pemilu selalu sama dari tahun ke tahun dan hasilnya juga tidak jauh berbeda.

Golkar selalu menjadi pemenangnya sedangkan kedua partai lainnya hanya tampak sebagai pelengkap dengan jumlah perolehan suara yang jauh dibawahnya.

#### 4. Pemilu Tahun 1999

Penyelenggaraan pemilu 1999 dilakukan dalam waktu yang relatif singkat, tetapi dapat dilakukan sesuai jadwal yaitu pada 7 Juni 1999. Walaupun banyak prediksi yang menyatakan bahwa pemilu ini akan kacau, ternyata hasilnya dapat dilaksanakan dengan cukup lancar tanpa adanya masalah yang berarti. Pemilu pertama pada masa reformasi ini dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia, dengan diikuti sebanyak 48 parpol.

#### 5. Pemilu Tahun 2004

Dalam sejarah singkat pemilu di Indonesia pada tahun 2004, masyarakat bisa memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakilnya secara langsung. Pemilu diselenggarakan secara serentak pada tanggal 5 April 2004 untuk memilih 550 anggota DPR, 128 anggota DPD dan DPRD pada periode 2004-2009. Sedangkan untuk pemilihan Presiden dan Wakilnya dilakukan pada 5 Juli 2004 untuk putaran I dan 20 September 2004 untuk putaran II.

#### 6. Pemilu Tahun 2009

Pemilu ini adalah pemilu kedua setelah tahun 2004 yang memilih presiden dan wakilnya langsung. Peraturan yang ditetapkan dalam pemilihan



presiden dan wakilnya ini dinyatakan bahwa pasangan calon yang terpilih adalah pasangan yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara, sedikitnya 20% suara di setiap provinsi. Pemilu kali ini diikuti oleh 44 parpol terdiri dari 38 partai nasional dan 6 partai lokal Aceh.

#### 7. Pemilu Tahun 2014

Pemilu pada tahun ini diadakan sebanyak dua kali yaitu pertama pada tanggal 9 April 2014 dengan tujuan untuk memilih para anggota legislatif, dan tahap kedua 3 bulan setelahnya pada tanggal 9 Juli 2014 untuk memilih Presiden dan wakilnya. Pemilu untuk anggota DPR, DPD, dan DPRD 2014 dilakukan untuk memilih 560 anggota DPR, 132 DPD dan DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia untuk periode 2014 – 2019. Ada sepuluh parpol yang mengikuti Pemilu tahun 2014 yaitu Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Pada tahun 2019 Indonesia akan kembali mengadakan Pemilu sebagai bagian dari sejarah singkat pemilu di Indonesia. Jumlah partai peserta Pemilu bertambah menjadi 16 parpol, lebih dari pemilu pada tahun 2014 sebanyak 12 parpol nasional dan 3 parpol lokal. Para parpol peserta pemilu 2019 tersebut yaitu PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, Garuda (Gerakan Perubahan

Indonesia), Partai Beringin Karya (Berkarya), PKS, Perindo, PPP, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), PAN, Hanura, Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), dan PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia). Juga ditambah 4 parpol lokal Aceh yaitu Partai Aceh, Partai Sira, Partai Daerah Aceh dan Partai Nangroe Aceh. Pemilu 2019 akan berlangsung serentak untuk memilih para anggota legislatif dan pemilihan Presiden serta wakilnya, yaitu pada 17 April 2019.

## **2.2. Organisasi Massa (ORMAS)**

### **2.2.1. Pengertian Organisasi Massa (ORMAS)**

Organisasi massa atau disingkat ormas adalah organisasi yang tunduk pada kekuatan massa. suatu istilah yang digunakan di Indonesia untuk bentuk organisasi berbasis massa yang tidak bertujuan politis . Bentuk organisasi ini digunakan sebagai lawan dari istilah partai politik. Ormas dapat dibentuk berdasarkan beberapa kesamaan atau tujuan.

### **2.2.2. Sejarah Organisasi Massa (ORMAS)**

Keberadaan organisasi massa ini muncul seiring dengan tumbuhnya organisasi masyarakat sipil (civil society) Sejarah perkembangan masyarakat sipil sebenarnya berasal dari sejarah masyarakat Barat. Akar perkembangannya dapat dirunut mulai Cicero (106-43 SM), seorang orator dan pujangga Roma. Cicerolah yang memulai menggunakan istilah societates civiles dalam filsafat politiknya.

Dalam tradisi Eropa sampai abad ke- 18, pengertian *Civil Society* dianggap sama dengan pengertian negara (the state), yakni suatu kelompok atau kekuatan yang mendominasi seluruh kelompok masyarakat lain. Maka ketika JJ Rosseau (1712-1778) menggunakan istilah Societes Civile, ia memahaminya sebagai negara yang salah satu fungsinya adalah menjamin hak milik, kehidupan, dan kebebasan para anggotanya.

Barulah pada paruh kedua abad ke-18, terminologi ini mengalami pergeseran makna. Negara dan Civil Society kemudian dipahami sebagai dua buah entitas yang berbeda, sejalan dengan pembentukan sosial dan perubahan-perubahan struktur politik di Eropa sebagai akibat pencerahan (enlightment) dan modernisasi dalam menghadapi persoalan duniawi, yang keduanya turut mendorong tergesurnya rezim-rezim absolut. Para pemikir politik yang mempelopori perbedaan ini antara lain Adam Furguson, Johann Forster, Tom Hodgkins, Emmanuel Sieyes dan Tom Paine.

Dalam perkembangan lebih lanjut, konsep Civil Society pernah dipahami secara radikal oleh para pemikir politik yang menekankan aspek kemandirian dan perbedaan posisi sedemikian rupa sehingga menjadi anti tesis dari state. Pemahaman seperti ini mengundang reaksi para pemikir seperti Hegel yang mengajukan tesis bahwa Civil Society justru memerlukan berbagai macam aturan dan pembatasan-pembatasan serta penyatuan dengan negara lewat kontrol hukum, administratif dan politik. Hegel rupanya ingin mengembalikan posisi negara sebagai entitas yang lebih berkuasa. *Civil Society*, bagi Hegel, merupakan kelas

borjuis, dan munculnya Civil Society adalah tidak lepas dari munculnya revolusi industri dan kapitalisme.

Akar sejarah Civil Society di Indonesia, bisa dirunut semenjak terjadinya perubahan sosial ekonomi pada masa kolonial, terutama ketika kapitalisme merkantilis mulai diperkenalkan oleh Belanda. Ia telah ikut mendorong terjadinya pembentukan sosial lewat proses industrialisasi, urbanisasi dan pendidikan modern. Hasilnya, antara lain adalah munculnya kesadaran baru di kalangan kaum elit pribumi yang kemudian mendorong terbentuknya organisasi-organisasi sosial modern di awal abad ke-20. Gejala ini menandai mulai bersemainya civil society di negeri ini.

Paska kemerdekaan (tahun 1950 an), pertumbuhan *Civil Society* di Indonesia mengalami kemajuan. Pada saat itu, organisasi-organisasi sosial dan politik dibiarkan tumbuh bebas dan memperoleh dukungan kuat dari warga masyarakat yang baru saja merdeka. Selain itu, Indonesia yang baru lahir belum memiliki kecenderungan intervensionis, sebab kelompok elit penguasa berusaha keras untuk mempraktikkan sistem demokrasi parlementer. Sayangnya, *Civil Society* yang mulai berkembang itu segera mengalami penyurutan terus menerus. Bahkan akibat dari krisis-krisis politik pada level negara ditambah dengan kebangkrutan ekonomi dalam skala massif, distorsidistorsi dalam masyarakatpun meruyak. Hal ini pada gilirannya menghalangi kelanjutan perkembangan Civil Society. Kondisi *Civil Society* demikian mencapai titik yang paling parah di bawah rezim Sukarno. Yang ditopang oleh upaya penguatan negara, dilakukan

dengan dukungan elit kekuasaan yang baru. Di bawah rezim demokrasi terpimpin, politik Indonesia didominasi oleh penggunaan mobilisasi massa sebagai alat legitimasi politik. Akibatnya, setiap usaha yang dilakukan oleh anggota masyarakat untuk mencapai kemandirian berisiko dicurigai sebagai kontra revolusi. Demikian pula, menguatnya kecenderungan ideologisasi politik telah mempertajam polarisasi politik sehingga merapuhkan kohesi sosial.

Orde Baru yang menggantikan rezim Sukarno membawa dampak tersendiri bagi perkembangan *Civil Society* di Indonesia. Pada dataran sosial-ekonomi, akselerasi pembangunan lewat industrialisasi telah berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia juga telah mendorong terjadinya perubahan struktur sosial masyarakat Indonesia yang ditandai dengan tergesernya pola-pola kehidupan masyarakat agraris.

Pada wilayah politik, Orba melanjutkan upaya sebelumnya untuk memperkuat posisi negara di segala bidang. Ini berakibat pada merosotnya kemandirian dan partisipasi politik masyarakat. Penetrasi negara yang kuat dan jauh, terutama lewat jaringan birokrasi dan aparat keamanan, telah mengakibatkan semakin menyempitnya ruang-ruang bebas yang dulu pernah ada. Paradoks yang lain adalah soal fungsi pers. Perkembangan *Civil Society* di Barat, seperti dikatakan Habermas, amat ditentukan oleh perkembangan ruang publik bebas. Praktik pembredelan pers sering dilakukan oleh negara.

### 2.2.3. Jenis-Jenis Organisasi Massa

Organisasi Massa (ormas) di Indonesia itu terbagi dari beberapa bagian yaitu:

1. Ormas Agama
2. Ormas Adat/Budaya
3. Ormas Nasional

Menurut Kemendagri ada sekitar 250 ribu. Diantaranya organisasi massa Islam. Organisasi massa Islam di Indonesia yaitu Sarekat Islam, Muhammadiyah, Al-Irsyad Al-Islamiyah, Mathla'ul Anwar, Persatuan Islam, Nahdlatul Ulama, Rabithah Alawiyah, Al Jam'iyatul Washliyah, Al-Ittihadiyah, Persatuan Umat Islam, Nahdlatul Wathan, Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, Majelis Ulama Indonesia dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia.

### 2.2.4. Tujuan dan fungsi Organisasi Massa

#### 1. Tujuan Organisasi Massa

Menurut Undang-undang, Ormas bertujuan untuk:

1. meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;
2. memberikan pelayanan kepada masyarakat;
3. menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
4. melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat;
5. melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;

6. mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
7. menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
8. mewujudkan tujuan negara.

## 2. Fungsi Organisasi Massa

Ormas berfungsi sebagai sarana:

1. penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi;
2. pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;
3. penyalur aspirasi masyarakat;
4. pemberdayaan masyarakat;
5. pemenuhan pelayanan sosial;
6. partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
7. pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

### **2.3 Sejarah Organisasi Massa Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI)**

Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) tentu saja tidak sekonyong-konyong terlahir begitu saja, namun SMI mempunyai sejarah yang cukup panjang terutama dalam proses pembangunannya.

Diawali sejak akhir tahun 2001 terbentuk Komite Pendidikan Bersama Indonesia (KPBI) yang terdiri dari Organisasi-Organisasi GM tingkat lokal/kota yaitu Keluarga Mahasiswa Yogyakarta (KMY), Komite Mahasiswa Mataram (KOMIT) yang setelah melakukan ekspansi di beberapa kampus berubah menjadi Komite Mahasiswa Mataram untuk Demokrasi (KOMID), Dewan Mahasiswa dan Rakyat untuk Demokrasi (DEMARKASI - Malang) dan Komite Mahasiswa Malang untuk Demokrasi (KOMANDO) yang dalam prosesnya kedua organisasi di Malang tersebut melakukan Unifikasi dan berubah menjadi Serikat Mahasiswa Malang (SMM), Di Semarang ada Serikat Mahasiswa Kaligawe (SEMAK) yang kemudian berubah menjadi Keluarga Aktivis Mahasiswa Demokratik (KAMD). Setelah melakukan perluasan di beberapa kampus di Semarang, Di Pekalongan ada Keluarga Mahasiswa Sekolah Sadar Sosial (KM-S3), di Jakarta ada Gerakan Mahasiswa Jakarta (GMJ) dan KM-Gunadharma serta KM-ISTN yang juga melakukan unifikasi menjadi Gerakan Mahasiswa Jabodetabek (GM-Jabodetabek). Di Surabaya ada Serikat Mahasiswa untuk Rakyat (SAMSARA), Di Bengkulu ada Solidaritas Mahasiswa untuk Demokrasi (SMUD), Di Palembang ada Gerakan Solidaritas Mahasiswa Palembang (Gersos-MP), Di Jombang ada Komite Aksi Mahasiswa Jombang



(KAMAJO) dan Jaringan Solidaritas Mahasiswa Jombang (JSMJ) yang kemudian unifikasi menjadi Serikat Mahasiswa Jombang (SMJ), Di Pasuruan ada Forum Diskusi Mahasiswa Merdeka (FORDISMA ).

Semangat persatuan yang ada di masing-masing organisasi tersebut menjadi benang merah yang terus diproses secara bersama-sama menuju tahapan-tahapan yang kualitatif.

KPBI pada waktu itu hanya sebatas melakukan pendidikan-pendidikan bersama secara nasional dan melakukan pertemuan-pertemuan yang terdiri dari pertemuan sisipan 3 bulan sekali dan pertemuan Nasional tiap 6 bulan sekaligus pelatihan nasional, Dalam proses Dialektikanya ketika perspektifnya semakin maju maka kemudian pada saat pertemuan KPBI di Semarang tahun 2004 menghasilkan keputusan untuk mempersiapkan kerangka bangunan Ormass Mahasiswa Tingkat Nasional dan secara nama berubah menjadi Komite Persiapan Serikat Mahasiswa Indonesia (KP – SMI), Setelah itu kemudian mulai berbicara tentang kebutuhan-kebutuhan pembangunan Ormass Mahasiswa tingkat Nasional, KP-SMI secara struktur terdiri dari Sekretaris Umum, Komisi Pendidikan & Propaganda, Komisi Organisasi & Jaringan kemudian setelah ada kebutuhan lebih lanjut komposisinya ditambah satu perangkat lagi yaitu Ketua Umum, Semua perangkat tersebut bekerja untuk penguatan Infrastruktur dan Suprastruktur Organisasi. Kemudian setelah semuanya matang maka pada tanggal 15 s/d 18 Agustus 2006 SMI melangsungkan Konferensi Nasional (KONFERNAS) yang pertama di Semarang, Sejak tanggal 17 Agustus 2006 (Hari Kelahiran

SMI) maka secara Defacto maupun Deyure telah berdiri satu Ormass Mahasiswa Tingkat Nasional yaitu Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) yang siap berdinamika di kancah Gerakan Demokratik tingkat Nasional dan siap mengemban tugas-tugas perjuangan massa Mahasiswa di Indonesia.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer (hasil penelitian dilapangan). Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (1989:12) penelitian hukum empiris yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat.

#### **3.2 Pendekatan Penelitian**

##### **3.2.1 Penelitian Normatif**

Pendekatan perundang-undangan yaitu kegiatan meneliti peraturan perundang-undangan, asas-asas maupun norma-norma hukum yang hidup dalam masyarakat terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan pemilihan umum.

##### **3.2.2 Penelitian Empiris**

Pendekatan sosiologi yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji faktor-faktor sosial yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Ormas

### **3.3 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan oleh Peneliti dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

3.3.1 Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat dengan cara wawancara, observasi dan kuesioner.

3.3.2 Data Sekunder

a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang isinya memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, buku, artikel surat kabar, artikel majalah, artikel yang bersumber dari internet, jurnal hukum, kamus, dan peraturan tentang pemilu dan Ormas

### **3.4 Pengumpulan Data**

Data bagi suatu penelitian merupakan bahan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Oleh karena itu, data harus selalu ada agar permasalahan penelitian itu dapat dipecahkan. Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder.

Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data di lapangan Dan data primer ini diperoleh dengan menggunakan kuesioner dan wawancara.

#### 3.4.1 Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi informasi atau keterangketerangan. Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh responden. Pengumpulan data melalui wawancara ini dilakukan hanya untuk cek silang (cross check) atas kuesioner yang telah dikumpulkan/diterima. Wawancara hanya dilakukan terhadap narasumber yang dipilih yang selanjutnya disebut informan

#### 3.4.2 Studi Kepustakaan

Selanjutnya mengenai data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (literature research) yang berupa bahan bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier yang berkaitan dengan Peraturan pemilihan umum dan peraturan ormas.

### **3.5 Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di organisasi massa Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) Cabang Mataram.

#### **3.5.1 Responden**

Responden dalam penelitian ini adalah anggota dari serikat mahasiswa Indonesia itu tersendiri

### **3.6 Analisis Data**

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya, sebab data itu masih merupakan data mentah dan masih diperlukan usaha atau upaya untuk mengolahnya. Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi dan mungkin juga dalam bentuk tabel. Setelah itu menggabungkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah di kumpulkan, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode-metode ilmiah.

### 3.6.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dianalisis sesuai dengan tugas ilmu hukum normatif yaitu deskripsi peraturan perundang-undangan, sistematisasi peraturan perundang-undangan, analisis peraturan perundang-undangan, interpretasi peraturan perundang-undangan.

### 3.6.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, internet dan majalah ilmiah dianalisis untuk menemukan persamaan dan perbedaannya.

## 3.7 Proses Berpikir

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis kualitatif dimana dengan bertitik tolak pada aturan hukum dan yang berkembang melalui pembahasan dalam bahan sekunder. Selanjutnya dengan logika berfikir deduktif, maka semua bahan diseleksi dan diolah serta dianalisis dengan memaparkan apa adanya. Dengan penelitian ini dapat memberikan masukan atau kritikan terhadap pemilu yang akan datang .